BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Dakwah yang berasal dari kata *Da'a*, *Yad'u*, *Da'watan* memiliki arti memanggil, menyeru atau mengajak. Dari segi bahasa dakwah berarti panggilan atau ajakan. Seperti tertulis pada Quran Surat *Al-Imron*: 104 bahwa dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dakwah terbagi menjadi 3 yaitu Dakwah Lisan (*da'wah bi al-lisan*), Dakwah Tulis (*da'wah bi al-qalam*), dan Dakwah Tindakan (*da'wah bi al-hal*). Berdasarkan ketiga hal tersebut dakwah memiliki beberapa metode dan teknik diantaranya metode Ceramah hingga Pemberdayaan Masyarakat.

Awal mula Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai strategi salah satunya adalah perdangan dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk dalam Dakwah Tindakan (*da'wah bi al-hal*). Di dalam pemberdayaan Masyarakat terdapat dakwah dengan Kekuasaan. ⁶ Dakwah kekuasaan merupakan salah satu strategi yang dipakai oleh Wali Songo. Dengan mendirikan kerajaan pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit (kerajaan Hindu /Budha) kala itu. Berkembangnya kerajaan Islam terutama di jawa juga merupakan salah satu bentuk dakwah.

Kerajaan Islam sampai sekarang masih bertahan salah satunya adalah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta berawal dari

¹ Wahidin, S. (2011). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 1

² Wahidin, S. (2011). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 1

³ Wahidin, S. (2011). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 1

⁴ Aziz, A. (2016). *Ilmu Dakwah*. Edisi Kelima. Jakarta: PrenadaMedia Group. Hal 358

⁵ Aziz, A. (2016). *Ilmu Dakwah*. Edisi Kelima. Jakarta: PrenadaMedia Group. Hal 358

⁶ Aziz, A. (2016). *Ilmu Dakwah*. Edisi Kelima. Jakarta: PrenadaMedia Group. Hal 379

Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kepemimpinan Sunan Pakubuwono III atas campur tangan Belanda, membuat Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi 2 yaitu Keraton Kasunanan Solo, dan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Perjanjian Giyanti memuat beberapa perjanjian diantaranya pembagian wilayah dan juga gelar. 8 Pangeran Mangkubumi (Sri Sultan Hamengku Buwono I) memplokamirkan Keraton Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Pangeran Mangkubumi diangkat sebgai Raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar "Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping X ing Nagari Ngayogyokarta Hadiningrat^{*,10} Gelar tersebut mempunyai makna yang mendalam. Gelar tersebut diwariskan secara turun temurun hingga sekarang yang disandang oleh Sri Sultan Hamengku Bawono X (Sri Sultan HB X) . Bahkan pada masa Sri Sultan HB IX, Sri Sultan menerangkan bahwa Gelar tersebut tidak akan berganti karena unsur filosofinya yang tinggi. 11 Gelar tersebut merupakan identitas bagi kerajaan Kraton sejak pertama kali dibangun. Namun pada masa kepemimpinan Sri Sultan HB X gelar tersebut diubah dengan Sabda Raja pada tanggal 30 April 2015. 12 Gelar tersebut berubah menjadi "Ngarso Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing

⁷ Ricklefs, M. (2002). *Yogyakarta Dibawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 : Sejarah Pembagian jawa*. Yogyakarta, Kraton Yogyakarta. Hal 79

⁸ Wawancara dengan KRT Jatiningrat

⁹ Ricklefs, M. (2002). *Yogyakarta Dibawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 : Sejarah Pembagian jawa*. Yogyakarta, Kraton Yogyakarta. Hal 115

¹⁰ Wawancara dengan KRT Jatiningrat

¹¹ Wawancara dengan KRT Jatiningrat

¹² Heru, S.A. (2016). *Satria Ing Ngalaga Penegak Paugeran Kasultanan Mataram Islam Ngayogyakarta Hadiningra*t. Yogyakarta:Masjid Gedhe Kauman.

Ngalogo Langgeng ing Bawono Langgeng, Langgeng ing Tata Panatagama" Identitas Sultan yang melekat pada Gelar tersebut menjadi berubah esensinya. Gelar Sebelumnya merefleksikan hubungan antara Raja, Tuhan dan Rakyatnya. Hal tergambarkan dari berbagai adat Kraton Yogyakarta seperti Memperingati Hari Maulid Nabi, dan hari-hari besar Islam lainnya. Terlebih lagi sejarah gelar "Khalifatullah" yang dianugrakan oleh Kerajaan Arab pada saat kepemimpinan Sultan Agung yang menjadi identitas dakwah.

Perubahan Gelar tersebut merupakan kemunduruan dari dakwah di dikarenakan dengan adanya penghapusan "Kalifatullah" Yogyakarta, menghapus juga esensi kepemimpinan Islam, serta dakwah Islam di Kraton Yogyakarta maupun di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta merupakan refleksi penyebaran Agama Islam melalui metode Kekuasaan. Keraton Yogyakarta juga merupakan sarana dakwah dari berbagai aspek. Aspek dakwah nya dapat berbentuk nilai dakwah, bangunan, bangunan, dan upacara adat. Dengan adanya perubahan Gelar tersebut dapat menimbulkan beberapa hal lainnya juga ikut berubah. Hal tersebut yang menjadikan alasan peneliti untuk meneliti bagaimana perubahan budaya yang terjadi setelah perubahan gelar raja. Selain itu pentingnya mengaitkan budaya dengan agama Yaitu sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat di tempat tertentu. Fungsi lainnya untuk mengarahkan atau menambahkan ajaran keyakinan keyakinan yang mampu mengarahkan ke ajaran yang benar dalam suatu masyarakat, tanpa harus menimbulkan gejolak atau

pertentangan. ¹⁴ Peneliti juga ingin melihat faktor yang memyebabkan terjadinya perubahan tersebut serta keterkaiannya dengan dakwah islam di Yogyakarta.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Keraton Yogyakarta merupakan salah satu sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah, Gelar Raja Kraton Yogyakarta merupakan identitas, jika gelar tersebut berubah maka budaya didalam keraton akan mengalami perubahan. Walaupun berbenturan dengan Undang-Undang Keistimewaan namun gelar raja tetap diubah di dalam institusi Keraton. Penolakan dari berbagai pihak tidak menghalangi perubahan gelar di dalam Kraton Yogyakarta. Sebagaimana identifikasi masalah, adapun rumusan masalah meliputi

- 1. Bagaimana Sejarah Pemberian Gelar di Kraton Yogyakarta?
- 2. Faktor apa yang menyebabkan perubahan gelar Sri Sultan HB X?
- 3. Bagaimana Perubahan Budaya yang terjadi setelah perubahan gelar Sri Sultan HB X?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1. Memerikan Sejarah Pemberian Gelar di Kraton Yogyakarta
- 2. Menjelaskan faktor yang menyebabkan perubahan gelar Sri Sultan HB X
- Memerikan Perubahan Budaya yang terjadi setelah perubahan gelar Sri Sultan HB X

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

¹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud dkk, Tradisi Baru, Penelitian Agama Islam,2001, Nuansa, Bandung. Hal 187

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan ilmu antropologi agama

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kraton Yogyakarta untuk menelaah lebih lanjut terkait kebijakan perubahan gelar Sri Sultan HB X.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau refrensi bagi lembaga dakwah dan para tokoh agama untuk menelaah lebih lanjut pengaruh perubahan budaya terhadap dakwah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Sistem Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab I akan memaparkan mengenai latar belakang masalah beserta permasalahannya, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab I penulis menjelaskan gambaran penelitian dari mulai latar belakang, batasan hingga manfaat penelitian tersebut.

Bab II terdiri dari Tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan "Perubahan Budaya di Keraton Yogyakarta: Studi Kasus Bangunan Keraton Yogyakarta". Bagian lain yaitu Landasan Teori berisikan tentang teori teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teori tersebut juga menjadi salah satu landasan pada penelitian ini.

Bab III berisikan tentang Metode penelitian. Bab III terbagi menjadi sub bagian yang terdiri dari pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian, dan analisis data. Bab IV memaparkan hasil dan pembahasan penelitian. Bab IV terdiri dari beberapa sub bagain diantaranya sejarah Kraton Yogyakarta, sejarah pemberian gelar di Kraton Yogyakarta, faktor penyebab perubahan gelar, serta perubahan budaya yang terjadi di Kraton Yogyakarta.

Bab V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran saran yang ditunjukkan kepada Instansi terkait. Saran kepada insansi terkait ditujukan kepada Kraton Yogyakarta sendiri, Lembaga Dakwah yang ada di Yogyakarta, dan Instansi Pemerintah yang menengahi permasalahan ini seperti DPRD DIY. Saran juga diberikan kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti perubahan budaya di Kraton Yogyakarta.